

Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok

Sandrina Dewi^{1*}, Wira Atman²

¹⁻²Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: sandrinadewi95@gmail.com*

Abstract: *The North Natuna Sea is an area of strategic importance to Indonesia, both in terms of national security and economy. Legally, this area is part of Indonesia's Exclusive Zone (EEZ), but China's unilateral claim to most of this area through the nine-dash line has created tension in the region. Indonesia faces a major challenge to safeguard the sovereignty of this region by using various strategies, one of which is defense diplomacy. This article aims to explore how Indonesia utilizes defense diplomacy in maintaining stability in the Natuna Sea, as well as to analyze the challenges faced and the effectiveness of this approach. The results show that Indonesia's defense diplomacy can maintain stability, but is still plagued by a number of challenges, including limited resources and the influence of major powers such as China.*

Keywords: *Defense Diplomacy, Natuna Sea, National Security, nine-dash line, Geopolitics.*

Abstrak: Laut Natuna Utara adalah wilayah yang memiliki kedudukan strategis bagi Indonesia, baik dari sisi keamanan nasional maupun ekonomi. Secara hukum, wilayah ini merupakan bagian dari Zona Eksklusif (ZEE) Indonesia, namun klaim sepihak Tiongkok terhadap sebagian besar wilayah ini melalui *nine-dash line* telah menimbulkan ketegangan di kawasan. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga kedaulatan wilayah ini dengan menggunakan berbagai strategi, salah satunya adalah diplomasi pertahanan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Indonesia memanfaatkan diplomasi pertahanan dalam menjaga stabilitas di Laut Natuna, serta untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dan efektivitas dari pendekatan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia dapat menjaga kestabilan, tetapi masih terbentur oleh sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan pengaruh kekuatan besar seperti Tiongkok.

Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Laut Natuna, Keamanan Nasional, *nine-dash line*, Geopolitik.

1. LATAR BELAKANG

Laut Natuna Utara yang terletak dibagian utara Kepulauan Riau adalah salah satu wilayah strategis Indonesia yang tidak hanya penting dalam konteks geopolitik regional tetapi juga berperan sebagai jalur ekonomi utama yang menghubungkan beberapa negara di Asia Tenggara. Letak geografisnya berada diantara dua samudra, yakni samudra Pasifik dan samudra Hindia, menjadikan Laut Natuna sebagai kawasan yang sangat vital dalam perdagangan internasional dan navigasi global. Selain itu, Laut Natuna juga menyimpan cadangan sumber daya alam dalam jumlah signifikan, khususnya pada sektor migas (minyak dan gas). Menurut data SKK Migas, wilayah ini memiliki cadangan gas terbukti 222 triliun kaki kubik (Tcf) yang Sebagian besar terdapat di Blok East Natuna. Volume tersebut menjadikan Laut Natuna sebagai salah satu Kawasan dengan cadangan gas terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai potensi mencapai USD 20-30 miliar. Sementara itu, potensi minyak bumi di Kawasan ini diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta barel, bernilai sekitar USD 35-

45 miliar, tergantung fluktuasi harga pasar global. selain energi fosil, Laut Natuna juga kaya akan sumber daya hayati laut termasuk beragam spesies ikan bernilai ekonomi tinggi, seperti tuna sirip kuning, cakalang, dan kerapu yang menjadikan perairan ini penting bagi sektor perikanan nasional. Perairan ini menyumbang sekitar 9-12% dari total tangkapan perikanan nasional, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai IDR 20 triliun per tahun (Indonesia P. , 2022). Wilayah ini juga merupakan bagian dari jalur pelayaran global yang dilalui oleh lebih dari 60% volume perdagangan dunia, dengan nilai transaksi melintas jalur ini mencapai USD 3,37 triliun setiap tahun. Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas Laut Natuna tidak hanya krusial bagi Indonesia, tetapi juga bagi ekonomi regional dan global. Namun, meskipun menjadi sumber daya yang kaya, Laut Natuna juga menjadi pusat ketegangan geopolitik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketegangan ini adalah klaim sepihak dari Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan yang mencakup wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna. Berdasarkan peta *nine-dash line* Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan yang jelas bertentangan dengan hukum internasional, khususnya konvensi hukum laut PBB (UNCLOS 1982). Indonesia yang secara tegas menolak klaim tersebut tetap menjaga haknya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna yang sah di mata hukum internasional. Meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam klaim Laut China, ketegangan ini tetap mempengaruhi kedaulatan Indonesia terutama dengan semakin banyaknya kapal-kapal Tiongkok yang melakukan aktivitas ilegal di wilayah ZEE Indonesia, seperti penangkapan ikan secara ilegal dan eksplorasi energi tanpa izin.

Konflik ini bukan hanya tentang sengketa wilayah semata, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keamanan maritim, dan politik internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu tidak dapat tinggal diam. Keberadaan Laut Natuna sebagai bagian dari wilayah Indonesia menjadi titik sentral dalam menjaga stabilitas kawasan dan kedaulatan negara. Dengan latar belakang ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keutuhan wilayahnya, mengelola potensi sumber daya alam, dan menghindari konfrontasi langsung yang dapat berujung pada eskalasi konflik. Untuk itu, diplomasi pertahanan menjadi kunci penting dalam menghadapi dinamika geopolitik yang ada. Diplomasi pertahanan Indonesia di Laut Natuna dirancang untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi dengan menggunakan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membangun kerjasama strategis dengan negara-negara lain. Diplomasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, menunjukkan komitmen negara terhadap hukum internasional, serta menjaga hak-hak Indonesia atas ZEE Laut Natuna. Melalui diplomasi pertahanan, Indonesia juga berusaha menjaga kestabilan politik dan ekonomi

dikawasan mengingat pentingnya Laut Natuna dalam jalur perdagangan global dan sebagai sumber daya alam yang bernilai.

Diplomasi pertahanan Indonesia di Laut Natuna mengandalkan beberapa strategi utama. Pertama, peningkatan kehadiran militer Indonesia melalui pemungutan armada TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) untuk mengawasi perairan secara maksimal dan mencegah aktivitas ilegal yang merugikan Indonesia. Kedua, Indonesia memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama pertahanan dengan negara-negara mitra strategis, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara ASEAN yang mendukung posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Kerjasama ini mencakup latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, serta bantuan dalam meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam upaya diplomatik multilateral untuk mengurangi ketegangan di Laut China Selatan. Melalui ASEAN, Indonesia berusaha untuk memperjuangkan penyelesaian sengketa secara damai dengan mengedepankan prinsip hukum internasional, serta mendorong pembentukan *Code of Conduct* (CoC) yang mengatur perilaku negara-negara di kawasan tersebut. Keberhasilan diplomasi Indonesia dalam hal ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas regional, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat merusak perdamaian kawasan. Meskipun demikian, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sedikit dalam menjalankan diplomasi pertahanan ini. Salah satunya adalah tantangan dalam hal sumber daya dan kapasitas militer yang terbatas. Indonesia meskipun memiliki kekuatan militer yang cukup signifikan di kawasan, namun masih memiliki keterbatasan dalam hal anggaran dan teknologi yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan di Laut Natuna. Selain itu, meskipun sudah ada kerja sama internasional yang erat, Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa negara besar, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan Laut China Selatan. Dengan demikian, Indonesia harus sangat berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan negara-negara besar ini untuk memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga.

Melihat tantangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dalam diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan Laut Natuna, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendekatan diplomatik Indonesia di kawasan tersebut. Dalam pembahasan ini, artikel ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat diplomasi ini dalam rangka menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna.

2. KAJIAN TEORITIS

Diplomasi pertahanan digunakan sebagai pendekatan utama dalam kajian ini. Konsep ini merupakan turunan dari pemikiran realisme dalam ilmu hubungan internasional yang menempatkan negara sebagai aktor utama dengan kepentingan utama pada pertahanan kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang memadukan unsur pertahanan dan diplomasi secara sinergis. Tujuannya adalah mencegah konflik terbuka melalui dialog, kerja sama teknis, serta pembangunan kepercayaan antarnegara di bidang militer. Bentuknya dapat berupa latihan bersama, pertukaran perwira, kunjungan tingkat tinggi, serta kehadiran aktif dalam forum-forum pertahanan multilateral (Nurchayani, 2021).

Diplomasi pertahanan menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks Laut Natuna karena wilayah ini bukan hanya titik rawan secara geografis, tetapi juga berimpitan langsung dengan klaim ekspansif Tiongkok. Ketegangan yang muncul tidak selalu memerlukan respons militer terbuka, melainkan strategi yang mampu menegaskan posisi kedaulatan secara firm namun tetap dalam koridor hubungan damai. Dalam kerangka ini, diplomasi pertahanan menawarkan pendekatan yang bersifat asertif namun terukur sehingga memungkinkan Indonesia mengedepankan kehadiran militer tanpa mengarah pada eskalasi konflik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi diplomasi pertahanan Indonesia di Laut Natuna. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga pertahanan, jurnal akademik, dan pemberitaan media dalam kurun waktu 2020-2025. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, dengan mengidentifikasi pola kebijakan, serta kerja sama pertahanan Indonesia di kawasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Konflik Laut Natuna

Laut Natuna merupakan bagian dari perairan Indonesia yang terletak di wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Secara hukum internasional, wilayah ini termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Jika wilayah ini tidak dikelola secara tegas dan konsisten, Indonesia berisiko

kehilangan potensi ekonomi strategis dalam bentuk hasil perikanan, hidrokarbon, serta akses terhadap jalur pelayaran internasional bernilai tinggi. Kehilangan kendali atas wilayah tersebut akan membuka celah bagi negara lain untuk mengeksploitasi cadangan energi di dasar laut, seperti gas alami di Blok D-Alpha yang nilai ekonominya mencapai puluhan miliar dolar. Selain itu, kerugian fiskal negara akan meningkat akibat hilangnya pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan, termasuk royalti, pajak, dan hasil ekspor yang selama ini menopang ketahanan ekonomi daerah pesisir dengan estimasi kerugian mencapai IDR 4-5 triliun per tahun akibat aktivitas ilegal kapa lasing, khususnya dari Tiongkok (Indonesia P. K., 2024). Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia memiliki hak hukum dan politik untuk mengelola kekayaan alam yang ada di Laut Natuna Utara tanpa gangguan dari negara lain. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, wilayah ini menjadi salah satu titik konflik akibat klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui peta *nine-dash line* yang mencakup sebagian besar Laut Natuna Utara. Klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah dan tidak diakui oleh Indonesia maupun oleh keputusan mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok melalui *nine-dash line* bertentangan dengan ketentuan UNCLOS. Meski demikian, Tiongkok tetap menunjukkan kehadiran aktif di wilayah tersebut melalui patroli kapal penjaga pantai dan aktivitas kapal nelayan yang dilindungi militer.

Insiden pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh kapal-kapal Tiongkok semakin sering terjadi, terutama sejak tahun 2019, di mana kapal nelayan yang dikawal oleh kapa penjaga pantai Tiongkok (China Coast Guard) terlihat memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara (Indonesia B. k., 2020). Kejadian ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga wilayah perbatasan. Tindakan Tiongkok tersebut kerap kali direspons oleh Indonesia melalui pengerahan kapal TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), namun pendekatan yang digunakan tetap bersifat defensif dan diplomatik untuk menghindari eskalasi konflik bersenjata. Laut Natuna bukan hanya penting secara geopolitik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cadangan gas alam di Blok Natuna, seperti Blok D-Alpha menjadikan wilayah ini salah satu aset strategis energi nasional. Selain itu, wilayah ini juga merupakan jalur pelayaran penting yang dilewati oleh berbagai kapal dagang internasional sehingga stabilitas dan keamanan kawasan ini sangat sangat penting, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi komunitas internasional.

Dalam konteks keamanan nasional, Laut Natuna adalah simbol dari tantangan baru bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim. Berbeda dengan ancaman tradisional yang

bersifat fisik dan militer, tantangan di Laut Natuna bersifat asimetris: hadir dalam bentuk gangguan sipil terorganisasi, infiltrasi kapal asing, hingga ancaman diplomatik terselubung dari negara-negara besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pendekatan diplomasi pertahanan yang cermat dan berkelanjutan. Konflik ini juga menyoroti lemahnya efektivitas rezim hukum internasional yang ada ketika berhadapan dengan negara-negara besar yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi dominan. Meskipun UNCLOS menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan laut internasional, ketidakpatuhan Tiongkok terhadap arbitrase dan terus dilakukannya aktivitas di wilayah yang diklaim Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional membutuhkan lebih dari sekedar dokumen legal; diperlukan juga kapasitas nasional yang kuat serta dukungan internasional yang solid.

Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Di satu sisi, Indonesia tidak termasuk dalam negara pengklaim Laut China Selatan secara keseluruhan seperti Vietnam dan Filipina, namun kehadiran Tiongkok di ZEE Indonesia membuat Indonesia harus turut aktif dalam dinamika kawasan. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil posisi yang tegas untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, namun tetap berpegang pada prinsip nonkonfrontatif yang mengedepankan jalur diplomasi pertahanan, memperkuat kehadiran dilapangan, dan memperluas kerja sama keamanan regional untuk menjamin stabilitas jangka panjang. Konflik di Laut Natuna tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuatan besar yang saling besaing di kawasan Asia-Pasifik. Dalam konteks global, Tiongkok berusaha memperluas pengaruh maritimnya sejalan dengan strategi *Belt and Road Initiative* (BRI) dan ambisinya untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu instrumen yang digunakan adalah *gray zone strategy*, yaitu strategi dimana sebuah negara menggunakan cara-cara non-militer namun tetap agresif, seperti pengarahan kapal penjaga pantai dan kapal nelayan milisi maritim (*maritime militia*), untuk menekan negara lain tanpa memicu perang terbuka. Aktivitas ini tampak jelas di Laut Natuna, di mana kapal-kapal nelayan Tiongkok kerap didukung secara diam-diam oleh aparat negara untuk memasuki wilayah ZEE Indonesia.

Sementara itu. Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadikan kawasan perairannya termasuk Laut Natuna sebagai jalur transit yang sangat strategis, baik dari sudut pandang ekonomi global maupun keamanan maritim internasional. Oleh sebab itu, gangguan terhadap wilayah perairan ini bukan hanya menyangkut isu bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan secara lebih luas. Hal ini diperkuat dengan ketertarikan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia yang secara aktif mendukung

prinsip kebebasan navigasi (*freedom of navigation*) di Laut China Selatan. Dari sisi domestik, respons Indonesia terhadap pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menunjukkan ketegasan lebih tinggi dalam menjaga kedaulatan maritim. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penguatan kehadiran militer dan pengawasan di wilayah tersebut, termasuk pembangunan pangkalan militer di Natuna, pengerahan TNI Angkatan Laut, dan pratoli gabungan dengan Bakamla. Selain itu, pemerintah juga gencar menyampaikan nota diplomatik protes kepada Tiongkok setiap kali pelanggaran terjadi sebagai bentuk penegasan posisi hukum Indonesia di mata internasional.

Namun, pendekatan Indonesia tetap berhati-hati dan tidak mengarah pada konfrontasi terbuka. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hubungan bilateral dengan Tiongkok yang melibatkan dimensi ekonomi, investasi, dan kerja sama regional lainnya. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dan banyak proyek infrastruktur nasional yang bergantung pada investasi Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan antara menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya secara tegas. Tantangan Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Koordinasi antarlembaga dalam pengawasan Laut Natuna masih belum efisien akibat tumpang tindih kewenangan dan absennya sistem komando terpadu. Hal ini menghambat respons cepat terhadap pelanggaran kapal asing. Keterbatasan armada patroli dan lemahnya sistem deteksi juga menyebabkan banyak titik rawan tidak terpantau secara menyeluruh. Di sisi lain, rendahnya literasi maritim masyarakat pesisir membuat mereka kurang memahami batas yurisdiksi nasional, yang berisiko dimanfaatkan oleh aktor asing. Selain itu, kehadiran komunitas nelayan lokal di Natuna yang merasa terancam oleh aktivitas kapal asing menambah tekanan bagi pemerintah untuk bertindak lebih konkret dan cepat dalam menjaga keamanan wilayah tersebut. Dengan berbagai kompleksitas ini, konflik di Laut Natuna menjadi lebih dari sekedar sengketa wilayah laut. Ia mencerminkan benturan antara kepentingan nasional, tekanan global, dan dinamika regional yang saling berkaitan. Maka dari itu, pengelolaan konflik ini tidak dapat diserahkan hanya pada kekuatan militer, melainkan membutuhkan strategis diplomatik yang cerdas, terukur, dan konsisten dalam jangka panjang. Laut Natuna harus menjadi arena pembuktian bahwa Indonesia mampu mempertahankan kedaulatannya melalui kombinasi antara ketegasan nasional dan keaktifan diplomatik dalam percaturan internasional.

Dalam konteks sosial-politik domestik, isu Laut Natuna turut memunculkan semangat nasionalisme dan menjadi perhatian publik nasional. Masyarakat Indonesia, khususnya di

wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, kerap merasa waswas akibat kehadiran kapal asing yang memasuki wilayah laut tempat mereka menggantungkan hidup sebagai nelayan. Ketegangan ini muncul desakan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi nelayan agar pemerintah tidak hanya bersikap simbolik, tetapi betul-betul memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat pesisir. Hal ini juga memperkuat pentingnya kehadiran negara dalam bentuk pembangunan infrastruktur pertahanan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan teknologi pemantauan maritim. Kehadiran konflik di Laut Natuna juga menguji posisi Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan selama ini. Sebagai negara nonklaiman utama dalam sengketa Laut China Selatan, Indonesia berusaha mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang (*balancer*) dengan memperjuangkan kepatuhan terhadap hukum laut internasional tanpa berpihak secara langsung pada blok kekuatan besar. Meskipun demikian, tekanan dari pihak-pihak eksternal untuk memihak baik dari negara Barat maupun Tiongkok semakin meningkat terutama ketika konflik menunjukkan eskalasi yang membahayakan stabilitas regional.

Di level regional, Indonesia juga berperan penting dalam mendorong pembentukan *Code of Conduct* (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok sebagai instrumen hukum yang mengatur tata kelola Laut China Selatan secara damai. Indonesia menekankan pentingnya CoC yang bersifat mengikat secara hukum merujuk pada UNCLOS 1982, serta mencakup larangan terhadap aktivitas militer provokatif dan pelanggaran terhadap yurisdiksi sah negara pantai. Bagi Indonesia, CoC harus menjadi jaminan bagi kepastian hukum dan stabilitas kawasan bukan sekedar kompromi politik yang lemah terhadap klaim sepihak. Namun, proses negosiasi CoC ini berjalan lambat dan penuh perbedaan kepentingan antar negara anggota ASEAN terutama karena tidak semua negara memiliki pendekatan yang sama terhadap Tiongkok. Meski begitu, Indonesia tetap memainkan peran sebagai pemimpin informal di ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan prinsip-prinsip UNCLOS. Konflik Laut Natuna juga menjadi ujian bagi kapabilitas Indonesia dalam mengembangkan strategi keamanan maritim yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Selain modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas pertahanan laut, Indonesia juga harus mengembangkan diplomasi pertahanan yang kuat termasuk kerja sama keamanan bilateral dan multilateral, misalnya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang (RI K. P., Laporan Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan Mitra Strategis (AS, Jepang, Australia), 2023), dan Australia dalam bentuk pelatihan militer bersama, peningkatan intelijen maritim, serta dukungan teknologi pengawasan laut.

Ketegangan di Laut Natuna memperlihatkan pentingnya pendekatan multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada aspek militer dan diplomatik, tetapi juga memperhatikan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan, pendidikan maritim, serta penguatan kesadaran geopolitik nasional. Dengan membangun masyarakat pesisir yang kuat dan berdaya, Indonesia tidak hanya menegaskan klaim kedaulatan secara formal, tetapi juga memperkuat legitimasi *de facto* di lapangan. Dalam jangka panjang, Laut Natuna dapat menjadi simbol dari bagaimana Indonesia menata ulang arsitektur keamanan maritim nasional dan regional ditengah kompetisi kekuatan global. Konflik ini merupakan cerminan dari tantangan keamanan modern yang melibatkan aktor negara dan non-negara, instrumen militer dan sipil, seta benturan kepentingan antara hukum internasional dan politik kekuasaan. Oleh karena itu, pengelolaan konflik Laut Natuna menuntut pendekatan yang tidak sekedar reaktif, tetapi strategis dan visioner demi menjaga kedaulatan, stabilitas kawasan, dan peran Indonesia sebagai kekuatan maritim yang dihormati di dunia.

Konflik di Laut Natuna juga tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya kontestasi militer di kawasan Indo-Pasifik. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap negara-negara ASEAN dalam menjaga kedaulatan maritim dan memastikan kebebasan navigasi di Laut China Selatan termasuk Laut Natuna Utara. Latihan militer bersama antara AS dan beberapa negara ASEAN, serta kehadiran kapal induk dan armada militer AS di sekitar perairan ini, merupakan bentuk peringatan strategis kepada Tiongkok agar tidak melangkahi norma dan hukum internasional. Di sisi lain, Tiongkok merespons dengan memperkuat kehadiran militernya, membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di kawasan sengketa, serta mengerahkan kapal penjaga pantai berukuran besar dan canggih yang kadang lebih bersifat ofensif daripada defensif. Indonesia yang secara prinsip tidak ingin terseret dalam rivalitas militer dua kekuatan besar tersebut tetap harus memperkuat kesiapsiagaan pertahanannya. Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap diplomasi semata tanpa diimbangi dengan modernisasi kekuatan militer dapa membuat Indonesia dipandang lemah atau tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan TNI AL, Bakamla, dan sistem deteksi dini di perbatasan laut menjadi sangat penting. Apalagi dalam beberapa kejadian, aparat keamanan laut Indonesia sempat kesulitan menangani kapal asing karena perbedaan ukuran, jumlah, dan tingkat persenjataan yang lebih unggul di pihak lawan.

Di sisi internasional, ketegangan Laut Natuna juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai lembaga regional lainnya. Beberapa negara telah menyampaikan nota diplomatik yang mendukung posisi Indonesia dan menolak klaim sepihak Tiongkok.

Namun, dukungan tersebut bersifat politis dan belum diikuti oleh instrumen kolektif yang konkret untuk mengurangi agresivitas Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional memberikan dasar legitimasi kuat, tanpa dukungan kekuatan nyata atau tekanan multilateral, pelanggaran oleh negara-negara besar masih terus terjadi. Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan luar negeri di tengah transisi kepemimpinan dan perubahan politik domestik. Setiap pergantian pemerintahan membawa pendekatan baru terhadap isu pertahanan dan diplomasi yang kadang menyebabkan kebijakan maritim menjadi tidak berkelanjutan. Padahal Isu seperti Laut Natuna membutuhkan strategi jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan konsensus nasional lintas partai, kementerian, dan pemangku kepentingan agar Laut Natuna ditempatkan sebagai isu strategis nasional yang lintas generasi. Konflik ini menunjukkan perlunya pengarusutamaan keamanan maritim ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Program-program pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial harus memasukkan komponen kesadaran geopolitik maritim sehingga masyarakat Indonesia terutama generasi muda memiliki pemahaman utuh tentang pentingnya menjaga perairan nasional termasuk Laut Natuna. Ketahanan nasional tidak hanya dibangun dari kekuatan senjata, tetapi juga dari kekuatan kolektif rakyat yang sadar akan pentingnya kedaulatan dan integritas wilayah.

Matode-Metode Dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia

Dalam skema strategis nasional, Indonesia menempatkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen pencegah konflik (conflict prevention mechanism). Mengingat Laut Natuna termasuk dalam wilayah yang rawan gesekan antaraktor, pendekatan preventif melalui komunikasi militer langsung, hotline antarangkatan laut, serta mekanisme resolusi insiden menjadi krusial. Tujuannya adalah untuk mencegah miscalculation atau eskalasi yang bersumber dari insiden tak disengaja di lapangan. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip diplomasi pertahanan yang mengedepankan stabilitas dan prediktabilitas dibandingkan konfrontasi terbuka (Ryacudu, 2020). Indonesia secara aktif memperjuangkan kepentingan maritimnya melalui keikutsertaan dalam forum-forum global seperti International Maritime Organization (IMO), Shangri-La Dialogue, dan konferensi keamanan Munich. Disana, diplomasi pertahanan Indonesia diarahkan untuk membangun citra sebagai negara yang tidak hanya menjaga kedaulatannya, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan keamanan global. Partisipasi ini memberikan panggung internasional untuk menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap

Laut Natuna sebagai bagian dari yurisdiksi nasional yang sah berdasarkan UNCLOS 1982, serta memperluas basis dukungan internasional terhadap klaim hukum Indonesia.

Diplomasi pertahanan Indonesia di Laut Natuna dijalankan melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan sinergi antara institusi militer, diplomati, sipil, dan sektor swasta. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa tantangan keamanan di wilayah ini tidak semata bersifat militer, melainkan juga mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi pertahanan yang digunakan tidak bersifat sektoral, tetapi melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti TNI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam hal pemantauan spesial maritim. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Salah satu aspek penting dari strategi diplomasi pertahanan yang kurang diperhatikan namun strategis adalah penguatan narasi publik Indonesia di ranah internasional. Melalui diplomasi publik, Indonesia berupaya membangun persepsi positif di mata dunia sebagai negara yang taat hukum, mendukung tata kelola maritim global yang inklusif, dan menjunjung tinggi prinsip non-konfrontatif dalam menyelesaikan konflik. Narasi ini secara konsisten dikembangkan dalam pidato-pidato diplomatik di forum internasional, media global, serta publikasi resmi negara dengan tujuan menegaskan legitimasi posisi Indonesia atas Laut Natuna sebagai wilayah yang sah dan diakui secara hukum internasional. Strategi ini juga digunakan untuk meredam potensi delegitimasi yang dapat dilakukan oleh negara lain melalui propaganda atau diplomasi koersif.

Ketika terjadi pelanggaran wilayah atau manuver provokatif oleh kapal asing di Laut Natuna, pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomatik taktis berupa pemanggilan duta besar negara terkait penyampaian nota protes resmi, serta publikasi insiden melalui media internasional. Langkah-langkah ini merupakan bentuk respons strategis untuk menegaskan batas-batas yurisdiksi Indonesia dan mempertahankan posisi hukum di hadapan komunitas internasional. Namun, tindakan tersebut dilakukan secara terukur agar tidak memicu eskalasi militer, sejalan dengan prinsip utama diplomasi pertahanan Indonesia yang menekankan pada deeskalasi dan stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai kanal komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen penyampaian pesan strategis (strategic signaling) kepada negara lain.

Kepemimpinan nasional memainkan peran penting dalam mengarahkan diplomasi pertahanan terutama dalam mengambil keputusan strategis menyangkut Laut Natuna. Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan dan pemberian mandat terhadap operasi-operasi militer terbatas di

kawasan tersebut. Selain itu, komitmen politik tingkat tinggi ditunjukkan melalui kunjungan langsung ke Natuna, pernyataan resmi tentang klaim kedaulatan, serta penegasan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi dalam urusan kedaulatan wilayah. Keterlibatan langsung dari kepemimpinan nasional ini memperkuat konsistensi kebijakan luar negeri (Diplomasi dan Kedaulatan di Laut China Selatan, 2024) dan menambah daya tekan diplomasi Indonesia secara umum.

Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut Natuna

Strategi diplomasi pertahanan Indonesia di Laut Natuna merupakan respons adaptif terhadap dinamika geopolitik dan tantangan kedaulatan yang kian kompleks. Sejauh ini, Indonesia telah memperkuat kerja sama pertahanan bilateral dan multilateral, membangun kehadiran militer yang permanen, meningkatkan patroli maritim, serta memanfaatkan forum regional untuk menegaskan posisi hukumnya. Upaya lain mencakup diplomasi publik, penguatan industri pertahanan nasional, serta integrasi pendekatan militer dan sipil guna memastikan kontrol strategis atas wilayah tersebut secara berkelanjutan dan sah secara hukum internasional. Diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia berfokus pada pencegahan konflik, penguatan postur keamanan, dan peningkatan kerja sama strategis, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Pendekatan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kepentingan menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas kawasan tanpa memicu eskalasi yang berlebihan. Pemerintah Indonesia secara aktif menjalin dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, dan Korea Selatan. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada latihan militer bersama tetapi juga mencakup pertukaran intelijen, penyelarasan doktrin militer, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan. Salah satu contoh konkret ialah latihan bersama *Garuda Shield* yang melibatkan skenario pengamanan perbatasan maritim dan simulasi respon cepat terhadap potensi pelanggaran wilayah. Selain itu, melalui perjanjian pertahanan dengan Jepang, Indonesia memperoleh dukungan teknologi dan sistem peringatan dini yang relevan untuk pengawasan Laut Natuna.

Upaya diplomasi pertahanan Indonesia juga terwujud dalam bentuk pembangunan dan modernisasi infrastruktur militer di wilayah Natuna, seperti pembangunan pangkalan TNI AL, penempatan sistem radar terpadu, serta penguatan armada patroli laut. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan krusial. Keterbatasan anggaran pertahanan memperlambat pengadaan sistem radar dan penguatan pangkalan. Letak geografis Natuna yang terpencil juga menyulitkan distribusi logistik dan mobilisasi personel. Di sisi lain,

pengoperasian teknologi pertahanan modern masih terkendala oleh kurangnya tenaga ahli dan kapasitas teknis. Langkah ini bertujuan menciptakan efek penangkal (*deterrence effect*) terhadap kehadiran aktor asing yang berpotensi mengancam kedaulatan (Indonesia P. K., 2024). Pemerintah juga menempatkan alat utama sistem senjata (alutsista) strategis, termasuk kapal cepat rudal dan pesawat pengintai maritim guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan kesiapsiagaan. Dalam konteks ini, TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memegang peran kunci dalam pelaksanaan strategi pengamanan wilayah laut secara terpadu dan berkesinambungan. Indonesia menempatkan dirinya sebagai aktor utama dalam mendorong penyelesaian damai konflik Laut Tiongkok Selatan melalui berbagai forum multilateral, seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan East Asia Summit (EAS). Melalui forum tersebut, Indonesia mempromosikan pendekatan diplomasi preventif dan mendorong penyusunan *Code Of Conduct* (CoC) yang mengikat secara hukum, guna memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982. Posisi Indonesia yang tidak termasuk negara pengklaim utama (*non-claimant state*) menjadikannya lebih netral dan dapat berfungsi sebagai *honest broker* dalam mendorong stabilitas kawasan, termasuk Laut Natuna yang kerap terdampak oleh klaim ekspansif Tiongkok.

Sebagai bagian dari penguatan pertahanan jangka panjang, Indonesia berupaya mengembangkan kemandirian industri pertahanan melalui kerja sama produksi dan alih teknologi. Dalam konteks Laut Natuna, diplomasi industri pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan maritim dan sistem pertahanan laut berbasis teknologi tinggi. Kerja sama dengan Korea Selatan dan Turki dalam bidang pengembangan kapal selam, radar maritim, dan pesawat tanpa awak (*drone*) menjadi bagian dari strategi nasional guna mengurangi ketergantungan pada produk asing serta memperkuat daya tawar diplomasi Indonesia. Diplomasi militer yang dijalankan melalui pertemuan antarangkatan bersenjata, kunjungan militer resmi, dan penempatan atase pertahanan menjadi saluran penting dalam memperkuat kerja sama dan membangun kepercayaan strategis dengan negara-negara mitra. Langkah ini digunakan untuk menyampaikan kepentingan keamanan Indonesia secara langsung kepada komunitas pertahanan internasional serta memperkuat persepsi bahwa Indonesia memiliki komitmen serius terhadap penegakan hukum laut internasional. Military diplomacy juga berperan dalam memfasilitasi kerja sama respons cepat terhadap pelanggaran wilayah yang bersifat lintas negara.

Meskipun diplomasi pertahanan identik dengan instrumen militer dan kerja sama strategis, Indonesia juga menerapkan pendekatan *soft power* sebagai bagian dari strategi

komprehensifnya. Pendekatan ini dilakukan melalui penyebaran nilai-nilai perdamaian, supremasi hukum internasional, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNCLOS 1982 dalam setiap pernyataan dan kebijakan luar negeri. Selain itu, Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya penyelesaian damai dan dialog terbuka, sekaligus menolak segala bentuk penggunaan kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Strategi ini bertujuan membentuk opini internasional yang mendukung posisi Indonesia, khususnya dalam menghadapi tekanan diplomatik dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan langsung di Laut Tiongkok Selatan. Strategi diplomasi pertahanan Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka besar visi Poros Maritim Dunia dan kebijakan keamanan nasional. Pemerintah berupaya menyelaraskan kepentingan pertahanan dengan kebijakan ekonomi, perikanan, energi, serta perlindungan lingkungan laut. Dalam konteks ini, penguatan diplomasi pertahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan multisektor yang ada di kawasan Natuna. Kehadiran aparat militer tidak hanya ditujukan untuk menegaskan kedaulatan, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi rakyat serta menjaga kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional sebagai negara kepulauan yang bertanggung jawab.

Dalam menunjang strategi diplomasi pertahanan, Indonesia juga menegaskan klaim hukumnya atas Laut Natuna melalui pendekatan yuridis yang solid. Pemerintah secara aktif mengkomunikasikan posisi hukumnya kepada dunia internasional, baik melalui nota diplomatik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun melalui publikasi resmi oleh Kementerian Luar Negeri. Indonesia menolak klaim historis Tiongkok atas *nine-dash line* karena tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982, dan hal ini diperkuat oleh putusan Permanent Court Arbitration (PCA) tahun 2016. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam menggali dukungan internasional dan menjustifikasi tindakannya dalam menjaga kedaulatan melalui jalur diplomasi pertahanan. Sebagai bentuk perluasan pendekatan strategis, pemerintah Indonesia juga menggandeng lembaga penelitian, universitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung kebijakan pertahanan maritim secara ilmiah dan objektif. Kajian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini digunakan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang memperkuat diplomasi Indonesia dalam forum internasional. Selain itu, keterlibatan akademisi dan pakar hukum laut dalam diskursus publik turut membantu membentuk narasi nasional yang mendukung upaya menjaga kedaulatan di Laut Natuna secara sah dan bermartabat.

Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) sebagai lembaga sipil bersenjata memiliki peran strategis dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan yang bersifat nonkonfrontatif.

Bakamla bertugas melakukan patroli, pengawasan, serta penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia termasuk di Laut Natuna Utara. Peran Bakamla sangat penting dalam menunjang kehadiran negara secara aktif tanpa memicu ketegangan militer. Kehadiran Bakamla yang tidak bersifat ofensif memberikan ruang diplomasi yang lebih lentur namun tetap tegas dalam memperlihatkan sikap Indonesia terhadap pelanggaran wilayah. Dalam menghadapi tantangan di Laut Natuna, Indonesia juga mulai mengintegrasikan diplomasi pertahanan dengan pemanfaatan teknologi strategis. Penguatan sistem deteksi dini (*early warning system*), satelit pengintai, serta integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data maritim menjadi bagian dari langkah modernisasi pertahanan. Adaptasi ini bertujuan untuk merespons bentuk ancaman nontradisional seperti spionase, penyusupan kapal asing secara tersembunyi, serta gangguan siber terhadap sistem navigasi nasional. Dengan demikian, diplomasi pertahanan tidak hanya bersifat konvensional, melainkan juga berkembang sesuai dengan tuntutan perang asimetris di era kontemporer.

Evaluasi dan Tantangan Diplomasi Pertahanan Indonesia

Diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara telah menunjukkan eksistensi sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri dalam mempertahankan kedaulatan nasional tanpa harus mengedepankan kekuatan koersif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang menghambat efektivitas implementasinya secara menyeluruh.

- **Klaim Sepihak Tiongkok dan Ketidakseimbangan Kekuatan**

Klaim sepihak Tiongkok melalui *nine-dash line* telah direspons Indonesia dengan berbagai langkah, seperti patroli rutin TNI AL dan Bakamla, nota diplomatik, penguatan posisi melalui UNCLOS, serta keterlibatan aktif dalam forum regional. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena dihadapkan pada ketimpangan kekuatan militer dan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Dominasi maritim Tiongkok terus berlangsung tanpa hambatan berarti karena ketiadaan mekanisme hukum internasional yang bersifat mengikat. Di sisi lain, respons domestik Indonesia masih terkendala oleh koordinasi lintas sektor yang belum optimal, sehingga menyebabkan kesenjangan antara tindakan di lapangan dan posisi diplomatik di forum internasional.

- **Keterbatasan kapasitas Pertahanan Nasional**

Keterbatasan kapasitas pertahanan Indonesia menjadi hambatan struktural dalam menjalankan diplomasi pertahanan secara optimal. Modernisasi alutsista berjalan lambat akibat keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada impor teknologi militer. Akibatnya, kehadiran militer Indonesia di Laut Natuna belum mampu menciptakan efek tangkal yang sepadan terhadap proyeksi kekuatan Tiongkok. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakseimbangan postur militer yang berdampak pada rendahnya kemampuan Indonesia untuk menjaga wilayah secara mandiri dan berkelanjutan. Tanpa penguatan kapasitas nasional secara menyeluruh, diplomasi pertahanan akan tetap berada dalam posisi defensif dan reaktif.

- **Disintegrasi Koordinasi Antarlembaga Keamanan**

Lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi kendala serius dalam efektivitas pelaksanaan diplomasi pertahanan. Tumpang tindih kewenangan antara TNI AL, Bakamla, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri kerap menghambat respons terpadu terhadap insiden pelanggaran di Laut Natuna. Ketiadaan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terstruktur menyebabkan fragmentasi kebijakan dan inefisiensi operasional di lapangan. Situasi ini memperlemah posisi Indonesia dalam membangun narasi tunggal yang kuat dan konsisten di tingkat regional maupun global, serta mengurangi kecepatan reaksi terhadap dinamika ancaman maritim yang bersifat fluktuatif dan multidimensional.

- **Minimnya Efektivitas Forum Multilateral Regional**

Efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia di tingkat regional masih dibatasi oleh lemahnya implementasi dan daya ikat forum multilateral, khususnya ASEAN. Meskipun Indonesia aktif mendorong penyusunan metode *Code of Conduct* (CoC) di Laut Tiongkok Selatan, prosesnya berjalan lambat dan belum menghasilkan kerangka yang mengikat secara hukum. Ketidakharmonisan kepentingan antarnegara anggota ASEAN serta dominasi pengaruh Tiongkok menghambat tercapainya konsesus substansial. Akibatnya, diplomasi pertahanan Indonesia belum mampu mengubah konstelasi strategis kawasan secara signifikan, sehingga posisinya tetap rentan terhadap tekanan kekuatan besar.

- **Kelemahan Sistem Pemantauan dan Pengawasan Maritim**

Keterbatasan sistem pemantauan maritim dan integrasi teknologi pengawasan menjadi hambatan dalam mendukung efektivitas diplomasi pertahanan. Infrastruktur

pemantauan, seperti radar dan sistem deteksi dini, masih tersebar dan belum terkoneksi secara menyeluruh dalam satu komando kendali nasional. Hal ini menyulitkan deteksi cepat terhadap pelanggaran ZEE oleh kapal asing, serta memperlambat respons militer dan diplomatik. Kelemahan dalam sistem informasi maritim ini menurunkan kemampuan Indonesia untuk menunjukkan kontrol penuh atas wilayahnya sekaligus melemahkan posisi tawar dalam forum kerja sama pertahanan regional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia berperan signifikan dalam menjaga stabilitas di Laut Natuna Utara di tengah tekanan eksternal, khususnya dari kebijakan ekspansionis Tiongkok melalui klaim *nine-dash line* yang tidak memiliki dasar hukum internasional. Dalam kerangka hukum dan kepentingan nasional, pendekatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia menampilkan karakter strategis yang tidak bersifat provokatif, namun tetap mencerminkan ketegasan terhadap pelanggaran kedaulatan. Pendekatan ini mampu mereduksi potensi konflik terbuka sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik regional. Temuan ini menjawab tujuan penelitian bahwa diplomasi pertahanan menjadi instrumen yang relevan untuk menghadapi ancaman non-tradisional di Kawasan maritim, walaupun efektivitasnya masih terbatas oleh faktor struktural seperti keterbatasan alutsista, sumber daya manusia pertahanan, dan keterpaduan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia memerlukan dukungan kebijakan yang lebih progresif serta penyelarasan antara kapabilitas militer dan agenda diplomasi luar negeri yang responsive terhadap dinamika keamanan regional.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diperlukan peningkatan kualitas diplomasi pertahanan yang tidak hanya menekankan pada kerja sama simbolik atau pertukaran militer rutin, tetapi diarahkan pada pembentukan system keamanan kolektif yang inklusif, berorientasi pada penguatan posisi hukum Indonesia, serta mengedepankan pendekatan preventif berbasis penguasaan teknologi dan informasi maritim. Pemerintah perlu memformulasikan peta jalan diplomasi pemerintahan yang terintegrasi dengan kebijakan luar negeri dan strategi ketahanan nasional, yang secara substansial mencerminkan kepentingan jangka panjang Indonesia dalam menjaga perbatasan maritimnya. Pengembangan kapasitas aktor-aktor diplomasi, baik dari unsur militer maupun sipil, harus menjadi prioritas termasuk melalui pelatihan lintas sektor yang melibatkan unsur akademisi, diplomat, dan personel keamanan laut. Di sisi lain, penting pula untuk membangun basis data yang memadai dan terbuka terkait intensitas pelanggaran wilayah dan respons negara sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

DAFTAR REFERENSI

- Diplomasi dan kedaulatan di Laut China Selatan. (2024, November 16). ANTARA News. <https://m.antaranews.com/berita/4471313/diplomasi-dan-kedaulatan-di-laut-china-selatan>
- Hanafiah, E. A. (2024). Strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman China Coast Guard di Laut Natuna Utara. Syntac Imperatif.
- Indonesia, B. K. (2020). Laporan akhir tahun: Dinamika keamanan laut Indonesia 2019–2020. Jakarta: Bakamla RI.
- Indonesia, K. P. (2024). Indonesia sebagai negara kepulauan mencanangkan sebagai poros maritim. Jakarta: Balitbang Kemhan RI.
- Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna–Natuna Utara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kemhan, P. S. (2024, July 8). RI tingkatkan kekuatan di Natuna Utara antisipasi kemungkinan terburuk. ANTARA News. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4187460/ri-tingkatkan-kekuatan-di-natuna-utara-antisipasi-kemungkinan-terburuk>
- Nurchayani, S., & Nurhuda, A. (2021). Diplomasi multilateral dalam strategi pertahanan Laut Natuna Utara. Jurnal Hubungan Internasional.
- Peran diplomasi maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia. (2020). Jurnal Amandemen.
- RI, B. K. (2024). Analisis kebijakan pertahanan pulau-pulau besar untuk mendukung poros maritim. Jakarta: Balitbang Kemhan RI.
- RI, K. P. (2021). Laporan peningkatan infrastruktur militer di Natuna. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- RI, K. P. (2023a). Laporan kerja sama pertahanan Indonesia dengan mitra strategis (AS, Jepang, Australia). Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- RI, K. P. (2023b). Laporan patroli dan pengawasan Laut Natuna oleh TNI AL. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- RI, K. P. (2024). Laporan modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas TNI AL di Natuna. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Rianda, E. A., & Lestari, N. (2022). Analisis strategi pertahanan laut outward looking guna melindungi kedaulatan di Laut Natuna Utara. Jurnal Studi Hubungan Internasional.
- Ryacudu, R. (2020). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam konflik Laut Natuna. Jurnal Ilmiah Pertahanan.
- Studi kerja sama keamanan maritim ASEAN dan diplomasi maritim Indonesia. (2022). Jurnal Keamanan Regional.
- Tarumingkeng, R. C. (2023). Dinamika geopolitik Laut Natuna: Tantangan dan peluang strategis. Jurnal X.
- Zaman, A. S. (2020, June). Diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna. Jakarta.